



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring "Bandar Seri Kota Piring"  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang - Kode Pos 29124  
Telp. (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050, 4575030, 4575058  
E-mail : [setdakepri@yahoo.com](mailto:setdakepri@yahoo.com) Website : [www.kepriprov.go.id](http://www.kepriprov.go.id)

### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 5 /KPTS-1.4/I/2022

#### TENTANG

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA  
BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

#### GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan Fungsi Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, maka perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 819);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 815);
11. Peraturan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

**Memperhatikan :** Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1505 Tahun 2021 tentang Koordinator dan Sub Koordinator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan.
  2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan.
  3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 3 Januari 2022

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**  
**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. LAMIDI, M.M**  
Pembina Utama Madya / (IV.d)  
NIP. 19620626 199003 1 008

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  6. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
1	2	3
1.	1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 5. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nama : <b>FERY TRIASTUTI, SE., MM</b> NIP : 19810205 200502 2 007 Pangkat/Gol. : Pembina / (IV.a) Jabatan : Analis Kebijakan Madya Sebagai Koordinator Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2.	1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Nama : <b>NURHAZAN, SE</b> NIP : 19670606 198810 2 002 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/ (IV.b) Jabatan : Analis Kebijakan Madya Sebagai Koordinator Kebijakan Sumberdaya Alam dan BUMD Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
3.	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	Nama : <b>ISRA GIGANTARA, S.Sos., M.Si</b> NIP : 19720905 200212 1 007 Pangkat/Gol. : Pembina Tk I / (IV.b) Jabatan : Analis Kebijakan Madya Sebagai Koordinator Administrasi Kebijakan Pembangunan dan Perekonomian Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
4.	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 4. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 5. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Nama : <b>Dr. YUDI HERTAWAN, ST., MM</b> NIP : 19740419 200604 1 009 Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I / (IV.b) Jabatan : Analis Kebijakan Muda Sebagai Sub Koordinator Pengendalian Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
5.	1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nama : <b>MASISWANTO, ST</b> NIP : 19740419 200604 1 008 Pangkat/Gol. : Penata TK.I / (III.d) Jabatan : Analis Kebijakan Muda Sebagai Sub Koordinator Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

NO.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
1	2	3
6.	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Nama : <b>DWI APRIANI PUTRI, S.Sos., MM</b> NIP : 19770408 200212 2 008 Pangkat/Gol. : Pembina / (IV.a) Jabatan : Analis Kebijakan Muda Sebagai Sub Koordinator Sumber Daya Alam Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
7.	1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Nama : <b>ANNA ROSA MANALU, SE</b> NIP : 19711029 200502 2 004 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / (III.d) Jabatan : Analis Kebijakan Muda Sebagai Sub Koordinator BUMD, Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
8.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Nama : <b>SLAMET BUDI UTOMO, S.Sos</b> NIP : 19680614 199903 1 008 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / (III.d) Jabatan : Analis Kebijakan Muda Sebagai Sub Koordinator BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
9.	1. Analis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 2. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Nama : <b>RIANTO, S.Sos</b> NIP : 19690802 199003 1 009 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / (III.d) Jabatan : Analis Kebijakan Muda Sebagai Sub Koordinator Analis Capaian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
10.	1. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nama : <b>EKO CAKRA IWANTO, SE</b> NIP : 19690319 200312 1 004 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / (III.d) Jabatan : Analis Kebijakan Muda Sebagai Sub Koordinator Kebijakan Pembangunan Daerah Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
11.	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Nama : <b>SAID FAIZAL AZAN, SE</b> NIP : 19750601 200212 1 011 Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / (III.d) Jabatan : Analis Kebijakan Muda Sebagai Sub Koordinator Analis Perekonomian Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,



Ir. LAMIDI, MM  
Pembina Utama Madya / (IV.d)  
NIP. 19620626 199003 1 008